



Pariwisata DIJ Bisa Terdampak

Setelah Marak Larangan Study Tour Sekolah

JOGJA - Maraknya larangan *study tour* bisa mengimbas ke sektor pariwisata DIJ. Selama ini, rombongan karyawan siswa menjadi salah satu penyumbang tingginya *mass tourism*.

Dinas Pariwisata DIJ pun berancang-ancang membuat kebijakan baru. Yakni, melengkapi rambu-rambu keamanan untuk mengantisipasi kecelakaan bus yang mengangkut rombongan pelajar.

"Kami masih berharap tidak ada larangan. Kami akan memberikan rambu-rambu supaya liburan atau *study tour* ini aman dan nyaman," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIJ Singgih Raharjo kepada *Jawa Pos Radar Jogja*, Rabu (22/5).

"Meski kekhawatiran masih ada, kalau melihat animo ke Jogja, saya kira masih cukup bagus," tambah dia.

Dia melanjutkan, di DIJ juga ada Organisasi Angkutan Darat (Organda) divisi pariwisata. Dispar bakal mengingatkan kembali item-item yang harus dipenuhi oleh pengelola angkutan pariwisata ketika membawa rombongan.

"Kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan untuk melakukan *checking*," tegasnya.

Adapun untuk masyarakat



PERKETAT PENGAWASAN: Petugas gabungan mengecek kelayakan bus wisata di Parkir Abu Bakar Ali, Danurejan, Kota Jogja, kemarin (23/5).

Jogjakarta yang hendak berwisata ke luar, dia meminta segala aspek keamanan dan kenyamanannya dipenuhi. Terutama moda transportasi yang digunakan. "Jika itu rombongan *study tour* sekolah, harus ada rekomendasi dari dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (disdikpora)," ujarnya.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) juga mengkhawatirkan menurunnya jumlah wisatawan ke DIJ akibat larangan *study tour*. Mereka mendesak pemangku

Kami akan memberikan rambu-rambu supaya liburan atau *study tour* aman dan nyaman."

SINGGIH RAHARJO
Kepala Dispar DIJ

kebijakan menegakkan regulasi secara tegas. Misalnya, membatasi usia armada pariwisata dan mewujudkan tata niaga yang sehat.

Ketua GIPI DIJ Bobby Ardiyanto menyampaikan,

perusahaan transportasi yang melanggar aspek keselamatan harus mendapat sanksi tegas. Kalau perlu, izin usaha mereka dicabut. "Kemudian, proses hukum sebagai bentuk *punishment* atas kelalaian mereka," ujarnya kemarin (23/5).

Mengenai tata niaga yang sehat, dia menyatakan perlunya dibuat standar ekosistem usaha yang terkontrol dan terevaluasi. Pelayanan yang diberikan harus diawasi oleh sistem. "Dengan demikian, pelaku usaha tidak

semata-mata mengejar keuntungan tanpa mengutamakan keselamatan pengguna jasa mereka," katanya. Bobby juga mengimbau kepada masyarakat untuk memilih perusahaan transportasi (*tour and travel*) yang mengedepankan kualitas pelayanan. Bukan yang memasang harga murah, tetapi mengabaikan keselamatan. "Ini bisa mendorong persaingan usaha yang sehat. Bukan sekadar bertarung harga dan cara bisnis yang negatif," tegasnya. (*wia/dri*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005